

# **HEGEMONI ELIT AGAMA PADA PEREMPUAN PESANTREN: EJAWANTAH JABATAN KEPALA DAERAH JAWA TIMUR**

**Nurul Azizah**

*Universitas Ibrahimy Situbondo*

*nurulazizah@ibrahimiy.ac.id*

## **Abstrak**

Keterlibatan elit lokal pesantren pada pemilu kepala daerah Jawa Timur menjadi penentu kemenangan. Pada Pemilihan Kepala Daerah peran elit agama sangat berpengaruh dalam mendulang suara pemilih. Elit menggunakan hegemoni agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu. Era gerakan agama baru mengubah kecenderungan paradigma berpikir bahwa pertama kalinya perempuan tampil menjadi kepala daerah. Tulisan ini bertujuan menganalisis hegemoni elit agama berbasis pesantren di era postmodernisme pada Pemilu khususnya di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif prespektif deskriptif dan analisis konten data kualitatif menunjukkan bahwa terdapat hegemoni dan gerakan patron klien pesantren antara kyai, santri, alumni, simpatisan dan masyarakat pesantren sebagai strategi memenangkan kepala daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori elit dan teori partisipasi politik. Data penelitian diperoleh dari analisis kepustakaan dan dokumen dari lembaga terkait. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana elit agama menghegemoni masyarakat dalam meningkatkan partisipasi publik dan meyakinkan untuk memilih calon perempuan sebagai Gubernur. Hasil analisis menunjukkan bahwa hegemoni elit agama menjadi alat untuk meraih kekuasaan dalam proses Pemilu. Elit agama cukup berpengaruh dalam memberikan dogma pada masyarakat melalui ritual rutin keagamaan seperti ceramah pengajian.

**Kata Kunci:** hegemoni, elit agama, pemilu, partisipasi politik, patron klien

## **Abstract**

*The involvement of the local elite pesantren in the regional head elections in East Java has become the determinant of the victory. In the direct regional head elections, the role of religious elites is very influential in gaining the voters. The elites used religious hegemony to increase people's political participation in the elections. The era of the new religious movement changed the paradigm tendency to think that women could be the regional heads. This paper aims to analyze the hegemony of pesantren-based religious elites in this postmodernist era in the elections, especially in East Java. This research uses descriptive perspective qualitative research methods and qualitative data content analysis shows that there was hegemony and movement of patrons of pesantren clients between kyai, santri, alumni, sympathizers, and pesantren communities as a strategy to win over the regional heads. In this study, researchers used elite theory and political participation theory approaches. Research data is obtained from literature analysis and documents from related institutions. The research problem is how the religious elites galvanized society in increasing public participation and convincing to choose female candidates like Gubernur. The results of the analysis showed that the hegemony of the religious elites became a tool to gain the power and win the election. The religious elites are influential in providing dogma to society through routine religious rituals such as through religious meetings.*

**Keyword:** hegemony, the religious elite, elections, political participation, patron

## Pendahuluan

Pasca masa reformasi dan sistem pemilu Kepala Daerah langsung dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan amandemen Undang – Undang No 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak<sup>1</sup>. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung jujur dan adil, dimulai dari Pemilihan Kepala Daerah tingkat I Gubernur dan Wakil, Pemilihan Kepala Daerah tingkat II Wali Kota dan wakil, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten tingkat II Bupati dan wakil Bupati.

Salah satu keuntungan dari sistem Pilkada ini adalah bahwa kebijakan ini mampu mengantarkan perempuan menjadi Kepala Daerah di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan di Jawa Timur terdapat fenomena baru yang mana perempuan-perempuan pesantren tampil menjadi pasangan calon Kepala Daerah, dan sebagian berhasil memenangkan Pilkada, dan terpilih menjadi Gubernur, Wali Kota dan Bupati di sebagian wilayah di Jawa Timur. Hal ini menggambarkan runtuhnya budaya patriarki. Pada suksesi Pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur, terlihat sisi gender dalam politik, terdapat beberapa perempuan pesantren yang terpilih menjadi Kepala Daerah dan wakilnya.

Sejauh ini cukup banyak literatur yang membahas tentang pengaruh kekuatan elite agama terhadap kemenangan pasangan calon kepala daerah. Kajian elit juga ditulis oleh Nania tentang pemanfaatan elit untuk merengkuh kekuasaan dan kemenangan pasangan calon Pilkada<sup>2</sup>. Pilkada serentak merupakan perwujudan proses demokrasi<sup>3</sup> untuk memilih pemimpin terbaik di tingkat lokal serta mampu membangun sinergisitas antara rakyat dan pemimpinnya<sup>4</sup>.

1 Idil Akbar, "Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan," *CosmoGov* 2, no. 1 (14 April 2017): 95, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>.

2 Guno Tri Tjahjoko, *Politik Ambivalensi: Nalar Elite Di Balik Pemenangan Pilkada*, Cetakan I (Yogyakarta: PolGov, 2016).

3 Nurul Azizah, Joseph Okwesili Nkwede, dan Mohamad Armoyu, "The Octopus-Like Power of Pesantren Dynasty in the Dynamics of Local Politics," ed. oleh Richard Meissner, *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (1 Januari 2021): 1962056, <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1962056>.

4 Idil Akbar, "Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Poli-

Tujuan penulisan ini melengkapi kekurangan studi yang ada yang terkait dengan dinasti politik. Lahirnya kuasa baru dari kekuasaan dalam dinamika politik lokal: (a) bagaimana kekuasaan trah pesantren berlaku dalam politik local; (b) faktor –faktor apa yang menyebabkan terjadinya dominasi kekuasaan trah pesantren dalam dinamika politik lokal, (c) Bagaimana dominasi trah pesantren dalam politik lokal mempengaruhi proses demokrasi. Ketiga pertanyaan ini penting diajukan mengingat ada fenomena meningkatnya calon kepala daerah perempuan dari pesantren, mereka tidak hanya didukung oleh partai politik, tetapi menggunakan organisasi perempuan menjadi alat untuk meraup suara pada pemilihan umum kepala daerah.

Tulisan ini berdasarkan pada tiga asumsi/argument, bahwa hegemoni elit agama menjadi alat untuk meraih kekuasaan dalam proses Pemilu. Karena besarnya pengaruh elit agama yang berfungsi memberikan dogmatis pada masyarakat melalui ritual rutin keagamaan seperti ceramah pengajian. Argumen ini sekaligus menjadi dasar utama mengapa seorang perempuan pesantren mampu memenangkan pertarungan pilkada serentak.

Kepemimpinan perempuan mempunyai cakupan universal<sup>5</sup>. secara mendasar bahwa pengertian kepemimpinan politik yaitu sesuatu hal terpenting pada sistem politik, mempunyai tujuan dan ideologi yang sama yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Kepemimpinan mempunyai sifat universal dan merupakan gejala kelompok atau sosial<sup>6</sup>. Universal oleh karena selalu

tik dan Pemerintahan."

5 M. Nazmul Islam, Fumitaka Furuoka, dan Aida Idris, "Mapping The Relationship Between Transformational Leadership, Trust in Leadership and Employee Championing Behavior During Organizational Change," *Asia Pacific Management Review* 26, no. 2 (Juni 2021): 95–102, <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.09.002>; Shaoping Qiu dkk., "The Effects of Authentic Leadership on Trust in Leaders, Organizational Citizenship Behavior, and Service Quality in the Chinese Hospitality Industry," *Journal of Hospitality and Tourism Management* 40 (September 2019): 77–87, <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.06.004>.

6 Mahmut Polatcan dan Osman Titrek, "The Relationship Between Leadership Behaviors of School Principals and Their Organizational Cynicism Attitudes," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 141 (Agustus 2014): 1291–1303, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.222>.

ditemukan dan diperlukan dalam kegiatan usaha bersama. Keberhasilan lembaga tergantung kualitas pemimpin politik<sup>7</sup>. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain, dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tanggap. Kepemimpinan politik memegang peranan yang sangat penting dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi sehingga sering dikatakan bahwa sukses atau gagal yang dialami sebagian besar pemimpin politik itu sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimilikinya.

Paul Joosse & Robin Willey<sup>8</sup> juga menulis tentang *Gender and charismatic power*, yang menunjukkan nilai pemulihan teori gender laten dari dalam konsep klasik, “karisma” Weber. Bacaan mendalam dari Weber mengungkapkan bahwa (a) alat untuk berteori luar biasa, agensi non-maskulinis, dan, (b) petunjuk yang menjelaskan kebijaksanaan konvensional (populer dan skolastik) bahwa karisma “bukan untuk wanita.” Sementara itu gerakan kontemporer mungkin terdoda untuk menghindari kepemimpinan karismatik semata karena warisan dominasi laki-laki. Ada nilai dalam formulasi Weber, yang mengantisipasi pergantian performatif dalam teori sosial yang akan menggoyahkan ontologi gender biologis<sup>9</sup>.

Nilai dalam pertukaran ini juga mengalir

kembali ke Weber, dengan menghadapi kecenderungannya yang terputus-putus untuk menggambarkan karisma dalam istilah yang sekarang kita kenal sebagai “kebiasaan kekuatan jantan,” kami mengungkapkannya ketidaksempurnaan yang belum terlihat sebelumnya (yaitu, mode legitimasi tradisional). Dengan demikian kajian analisisnya menunjukkan mutualitas yang memberdayakan antara teori gender kontemporer dan “klasik.”

Di Indonesia, peran politik perempuan menentukan politik di Indonesia<sup>10</sup>, Gerakan perempuan Indonesia ibarat sebuah perjalanan, sudah menempuh jarak yang cukup jauh dan panjang<sup>11</sup>. Mengalami masa pasang, dan terjebak dalam kesurutan, tenggelam atau ditenggelamkan. Perempuan dalam menentukan politik lokal di Indonesia sangat memberikan dampak yang signifikan dalam tahapan Pilkada lokal yang berlangsung di Indonesia<sup>12</sup>

Pengertian hegemoni secara umum adalah sebagai suatu bentuk dominasi kekuasaan kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial lainnya<sup>13</sup>. Dominasi melalui kekuatan

7 Asnath N. Natar, “Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 2 (30 Juli 2019): 133, <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.133-147>; Mouliza Kristhoper Donna Sweinstani, “Perempuan dan Politik Industri Kreatif dalam Kerangka Pembangunan: Lesson Learned dari Indonesia dan Thailand,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (22 Januari 2021), <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.1-15>.

8 Paul Joosse dan Robin Willey, “Gender and Charismatic Power,” *Theory and Society* 49, no. 4 (Juni 2020): 533–61, <https://doi.org/10.1007/s11186-020-09392-3>.

9 Ki-Young Shin, “An Alternative Form of Women’s Political Representation: Netto, a Proactive Women’s Party in Japan,” *Politics & Gender* 16, no. 1 (Maret 2020): 78–98, <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000606>; Joseph C Ebegebulem, “The Imperative of Democratic Consolidation in Nigeria Through,” *African Journal of Politics and Administrative Studies (AJPAS)* 10, no. 1996 (2017): 97–105; Julie Lassébie, “Gender Quotas and The Selection of Local Politicians: Evidence from French Municipal Elections,” *European Journal of Political Economy* 62 (Maret 2020): 101842, <https://doi.org/10.1016/j.ejpolco.2019.101842>.

10 Linda Dwi Eriyanti, “Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (16 Januari 2017): 69, <https://doi.org/10.22146/jsp.18002>; Muhammad Yusuf, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Kearifan Lokal: Pemikiran Ulama Bugis Dan Budaya Bugis,” *Analisa: Journal of Social and Religion* 22, no. 1 (2015): 69; Kholid Zulfa, “Belenggu Kepemimpinan Perempuan Dalam Ranah Politik,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 3, no. 1 (29 Maret 2004): 67, <https://doi.org/10.14421/musawa.2004.31.67-78>; Ni Wayan Arini, “Kepemimpinan Lokal dan Kehidupan Sosial Politik Perempuan di Dua Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (5 Januari 2015), <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i2.4466>; Celtis Lativo-lia Sangari, Agustinus Pati, dan Alfon Kimbal, “Peran Politik Perempuan dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal (Studi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat),” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (14 Juli 2017).

11 Mouliza Kristhoper Donna Sweinstani, “Perempuan dan Politik Industri Kreatif dalam Kerangka Pembangunan.”

12 Putri Limilia, “Perempuan dan Kesenjangan Digital Di Dalam Keluarga,” *Humanisma : Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2018), <http://dx.doi.org/10.30983/jh.v2i1.510>.

13 Vita Agustina, “Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poli-

kepemimpinan baik secara moral maupun aksi intelektual, sehingga tercipta dua kelas berbeda yakni kekuatan elit yang mampu mempengaruhi kaum kelas sosial menengah ke bawah dan moral. Hegemoni juga bisa artikan sebagai dominasi oleh kelompok tertentu terhadap kelompok sosial lainnya, dengan cara persuasif maupun dogmatis intimidatif, sehingga mampu mengimplementasikan konsep-konsep ide kelompok elit terhadap kelompok sosial yang memiliki ketergantungan

Paper ini menjelaskan hegemoni Antonio Gramsci pada kekuasaan mayoritas<sup>14</sup> yang mengarah pada makna Hegemoni dalam ideologi Demokrasi<sup>15</sup>. Fenomena hegemoni agama oleh kyai pada santri dan seluruh patron klien masyarakat secara umum dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik, guna meraih dukungan suara pemilih. Paper ini memusatkan studi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung di Provinsi Jawa Timur. Ada fenomena elit agama atau kyai menjadi tim sukses bagi calon kepala daerah dari kalangan perempuan pesantren. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara langsung secara mendalam antara peneliti dan subjek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari sekumpulan data pendukung untuk memperkaya khasanah hasil penelitian. Metode analisa informasi pada studi ini memanfaatkan pendekatan analisa informasi Antonia Gramsci<sup>16</sup>, serta memakai penyajian informasi Miles serta Huberman<sup>17</sup>. Model

gami," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 2 (3 Desember 2014): 127, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.127-140>.

14 Kurniati, "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara : Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (10 Desember 2018): 257, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>.

15 Zezen Zaenudin Ali, "Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia," *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (10 Desember 2017): 63, <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>.

16 Khoirurrijal, "Islam Nusantara Sebagai Counter Hegemoni Melawan Radikalisme Agama di Indonesia," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (22 Juni 2017): 77, <https://doi.org/10.32332/akademika.v22i1.616>.

17 Matthew B. Miles, A.M. Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Pub-

lications, Inc, 2014).

analisis Miles serta Huberman ialah proses analisis interaktif yang berupa siklus. Sehingga sanggup mengatakan kenyataan kalau dalam kegiatan analisis informasi kualitatif sering dicoba secara interaktif, serta berlangsung secara berkesinambungan sampai tuntas sempurna. Metode analisis ini terdiri dari tiga elemen adalah; reduksi informasi, penyajian informasi serta penarikan dan uji kesimpulan (erdiansyah, 2010).

## Hegemoni Elit Agama dan Kekuasaan

Hegemoni agama bagi Antonio Gramsci terkait pada pengaruh kekuasaan yang tercipta karena agama<sup>18</sup>. Kekuasaan ini dapat dirasakan oleh pemuka agama, sehingga dengan berkuasa mereka bisa mendapatkan semua apa yang mereka inginkan. Kekuasaan dalam lingkup agama nampak lewat tausiah elit agama pondok pesantren baik oleh Kyai ataupun keluarga besar pondok pesantren<sup>19</sup>.

Terkadang dalam tausiah terdapat tema kepemimpinan yang rentan dengan unsur-unsur politik yang terdapat di pondok. Kyai memiliki kekuasaan sangat besar dalam mengendalikan manajemen pesantren serta kesuksesan pesantren. Semua santri beranggapan bahwa kyai adalah sosok pemimpin pesantren sekaligus sebagai pengganti orang tua mereka. Apa yang dikatakan Kyai wajib dipatuhi. Kyai mengantarkan dan mengenalkan pasangan calon pemimpin kepala daerah pada saat santri berkumpul, biasanya dilakukan di saat sebelum mencermati pengajian ataupun acara keagamaan lainnya.

Sosialisasi pengenalan pasangan calon dilakukan kyai sebelum pengajian dimulai agar para santri lebih mudah mengingat tersebut<sup>20</sup>. kesempatan yang sempit tersebut biasa digunakan Kyai guna penguatan penegasan calon yang

lications, Inc, 2014).

18 Zezen Zaenudin Ali, "Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci."

19 Endang Turmudi, *Struggling for the Umma : Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java* (ANU Press, 2006), [https://doi.org/10.26530/OAP-EN\\_459752](https://doi.org/10.26530/OAP-EN_459752).

20 Stratos Patrikios dan Georgios Xezonakis, "Religious Market Structure and Democratic Performance: Clientelism," *Electoral Studies* 61 (Oktober 2019): 102073, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102073>.

didukung nantinya. Tidak wajib menunggu tema taushiah yang menyinggung politik ataupun tidak. Bahkan, tidak jarang Kyai membicarakan dukungan ini secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi ataupun diselingi dengan isi ceramahnya.

Sebagian besar pondok Pesantren di Jawa Timur tidak mengaitkan dan mengajarkan masalah politik pada kurikulum pendidikan santri. Meski demikian, sebagian kyai pada saat pesta demokrasi Pemilu Kepala Daerah secara terang terangan menghegemoni santri, partisan, dan masyarakat untuk memilih calon yang didukung kyai. Biasanya pada saat acara pengajian kyai akan memberikan materi ceramah tentang kepemimpinan, sehingga para pendengar atau santri mengetahui kriteria pemimpin yang baik menurut agama Islam<sup>21</sup>. Berikut ini adalah gambaran bahwa sebagian kyai di Jawa Timur menjadi tim sukses dari beberapa pasangan calon pemimpin kepala daerah:

**Tabel 1. Elit Pesantren Menjadi Tim Sukses Pilkada di wilayah Jawa Timur**

No	Nama	Tempat	Elit Agama/ Pesantren	Posisi bertarung	Partai Pengusung
01	Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa	Gubernur Jawa Timur	Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto dan Aliansi Jaringan Kyai dan Santri Nasional (JKSN)	Calon Penantang	Partai Demokrat, PPP
02	Munjidah Wahab	Bupati Jombang	Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang	Pertahana/ Incumbent	PPP, Demokrat, PDIP, Gerindra
03	Khoironi, M.PdI	Wakil Bupati Situbondo	Pondok Pesantren Salafiyah Syaifiyah Sukorejo Situbondo	Penantang	PPP, Demokrat, PDIP, PAN
04	Puput Tanriana, SE.	Bupati Probolinggo	Ponpes syekh Abdul Qodir al-Jailani Probolinggo	Pertahana/ Incumbent (Dinasti Politik)	PKB, Nasdem, Golkar
05	Ipuk Fiestiandi	Bupati Banyuwangi	KH. Imam Sibaweh, Ponpes Al-Atiq Karetun Purwoharjo Banyuwangi, dan lain-lain.	Pendatang/ Dinasti Politik	PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP, Hamura
06	dr. Hj. Ikfina Fatmawati	Bupati Mojokerto	Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto	Penantang	Demokrat, Nasdem, PAN, Hanura, PKS dan Gerindra
07	Aminatun Habibah	Wakil Bupati Gresik	Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo dan Pengurus PBNU	Penantang	Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat, PPP, PAN, PKS
08	Ir. Hj. Indah Amperwati	Wakil Bupati Lumajang	Ponpes Roudlotul Rokmaniyah Suko dan Ponpes KH. Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Penantang	Partai Gerindra dan PKB
09	Dr. Hj. Anna Muawwanah	Bupati Bojonegoro	Pondok Pesantren Al-Rosyid Bojonegoro : KH. Alamul Huda	Penantang	PKB, PDIP, PKPI
10	Dewi Kholifah	Wakil Bupati Sumenep	Pondok Pesantren Terate, Pandian Sumenep	Penantang	Demokrat, PAN, Gerindra, PKS, Hanura, PBB, Golkar dan PPP

## Kepemimpinan Perempuan Pesantren di Ranah Politik.

Keterwakilan perempuan era pada

21 Benjamin K. Sovacool, "Bamboo Beating Bandits: Conflict, Inequality, and Vulnerability in the Political Ecology of Climate Change Adaptation in Bangladesh," *World Development* 102 (Februari 2018): 183–94, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.014>.

politik lokal seperti masalah keterwakilan adalah aspirasi masyarakat secara umum dan kepentingan ideologi gender pada perempuan. Secara kuantitatif, prosentase keterpilihan perempuan menjadi pemimpin di pemerintahan juga masih kecil dibandingkan dengan pemimpin laki-laki<sup>22</sup>. Kurangnya keterwakilan perempuan ini lebih terlihat pada posisi kepala daerah seperti menjadi Gubernur, Wali Kota dan Bupati, yang menunjukkan besarnya kekuatan hegemoni laki-laki dalam pemerintahan lokal di Indonesia. Hambatan kultur dan budaya patriarki menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan pesantren yang akan maju menjadi kandidat kepala daerah dalam dinamika politik lokal<sup>23</sup>. Jabatan pemimpin dianggap layak bagi laki-laki saja. Temuan ini konsisten dengan argumen yang dikemukakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang berusaha menjelaskan kurangnya representasi perempuan dalam politik dengan budaya tradisional-patriarki dan kurangnya konsepsi egaliter tentang peran gender<sup>24</sup>. Dengan demikian disimpulkan bahwa hambatan budaya menciptakan hambatan bagi perempuan, tidak hanya dalam proses pencalonan dan pemilihan, tetapi juga dalam proses representasi dan kekuasaan setelah mereka terpilih.

Pada umumnya perempuan memerlukan perlakuan khusus (*affirmative action*) untuk menumbuhkan keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan, sehingga perempuan bisa mengaktualisasikan diri di semua tingkatan mulai dari lokal, regional bahkan sampai tingkat nasional. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji tentang kesempatan perempuan dari pesantren untuk dapat berkiprah dalam dinamika politik dan proses demokrasi. Paper tentang perempuan dalam politik lokal perlu diuji secara empiris, Hal ini merepresentasikan studi tentang perempuan di pemerintahan lokal.

22 Ahu Sumbas, "Gendered Local Politics: The Barriers to Women's Representation in Turkey," *Democratization* 27, no. 4 (18 Mei 2020): 570–87, <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1706166>.

23 Suneeta Dhar, "Gender and Sustainable Development Goals (SDGs)," *Indian Journal of Gender Studies* 25, no. 1 (Februari 2018): 47–78, <https://doi.org/10.1177/0971521517738451>.

24 Laila Prager, "Emirati Women Leaders in the Cultural Sector: From 'State Feminism' to Empowerment?," *Hawwa* 18, no. 1 (8 Mei 2020): 51–74, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341370>.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan meminimalisir stereotip tentang aktifis perempuan di politik, Hansen menjelaskan perempuan berperan meningkatkan partisipasi pemilih ditingkat lokal<sup>25</sup>. Sementara peneliti selain Hansen menuliskan peran perempuan berbasis partai mengalami kesenjangan dalam eksistensi perempuan pada politik lokal<sup>26</sup>. Hal ini tidak luput dari peran Pemerintah daerah mempromosikan dan mensosialisasikan kesetaraan gender, hal ini dijelaskan Lassebie dalam keterwakilan perempuan pada politik lokal<sup>27</sup>.

Fenomena keterpilihan perempuan dalam politik lokal terjadi masif di pondok pesantren Jawa Timur. Rata-rata perempuan memperebutkan kursi Kepala Daerah pada pesta demokrasi lima tahunan secara langsung (Pilkada) di wilayah ini.

**Tabel 1.2 Unsur Pesantren Pendukung Pemimpin Perempuan Politik**

No	Nama	Tempat	Elit Agama/ Pesantren	Posisi bertarung	Partai Pengusung
01	Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa	Gubernur Jawa Timur	Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto dan Aliansi Jaringan Kyai dan Santri Nasional (JKSN)	Calon Penantang	Partai Demokrat, PPP
02	Munjidah Wahab	Bupati Jombang	Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang	Pertahana/ Incumbent	PPP, Demokrat, PDIP, Gerindra
03	Khoironi, M.PdI	Wakil Bupati Situbondo	Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo	Penantang	PPP, Demokrat, PDIP, PAN
04	Puput Tantriana, SE.	Bupati Probolinggo	Ponpes syekh Abdul Qadir al-Jalini Probolinggo	Pertahana/ Incumbent (Dinasti Politik)	PKB, Nasdem, Golkar
05	Ipuk Fiestiandi	Bupati Banyuwangi	KH. Imam Sibaweh. Ponpes Al-Atiq Karean Purwoharjo Banyuwangi, dan lain-lain.	Pendatang/ Dinasti Politik	PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP, Hamura
06	dr. Hj. Ikfina Fatmawati	Bupati Mojokerto	Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto	Penantang	Demokrat, Nasdem, PAN, Hamura, PKS dan Gerindra
07	Aminatun Habibah	Wakil Bupati Gresik	Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo dan Pengurus PBNU	Penantang	Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat, PPP, PAN, PKS
08	Ir. Hj. Indah Amperwati	Wakil Bupati Lumajang	Ponpes Roudhotul Rokmaniyah Suko dan Ponpes KH. Syarifuddin Wonorejo Lumajang	Penantang	Partai Gerindra dan PKB
09	Dr. Hj. Anna	Bupati Bojonegoro	Pondok Pesantren Al-Rosyid Bojonegoro : KH. Alamul Huda	Penantang	PKB, PDIP, PKPI
10	Dewi Kholifah	Wakil Bupati Sumenep	Pondok Pesantren Terate, Pandian Sumenep	Penantang	Demokrat, PAN, Gerindra, PKS, Hamura, PBB, Golkar dan PPP

Sumber: Sumber data diolah peneliti 2021

Pada pemilihan kepala daerah menjadi pintu permulaan bagi perempuan pesantren ikut andil diri pencalonan kepala daerah dalam dinamika demokrasi di politik lokal. Pada tabel berikut ini terlihat dukungan pondok pesantren terhadap kandidat perempuan yang memenangkan pertarungan Pilkada.

25 Eric R. Hansen dan Christopher J. Clark, "Diversity in Party Leadership in State Legislatures," *State Politics & Policy Quarterly* 20, no. 1 (Maret 2020): 81–107, <https://doi.org/10.1177/1532440019885378>.

26 Ki-Young Shin, "An Alternative Form of Women's Political Representation."

27 Julie Lassébie, "Gender Quotas and The Selection of Local Politicians."

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat sepuluh perempuan berasal dari pesantren yang terpilih menjadi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Khofifah Indar Parawansa terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur 2018-2022, berhasil mengalahkan calon petahana Saifullah Yusuf yang saat itu menjabat sebagai wakil Gubernur Jawa Timur. Kegigihan Khofifah cukup teruji setelah mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Timur untuk ke tiga kalinya. Dari semangat tidak pantang menyerah dan putus asa inilah menjadi magnet terbesar bagi perempuan-perempuan pesantren untuk ikut meramaikan bursa calon Kepala Daerah di berbagai wilayah di Jawa Timur. Terlebih lagi, Khofifah sampai saat ini menjabat sebagai ketua umum pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Alasan dasar inilah yang menjadi pedoman bagi perempuan pesantren yang juga sekaligus pengurus Muslimat NU di berbagai wilayah di Jawa Timur berani mencalonkan diri menjadi kandidat Kepala Daerah. Bagi perempuan pesantren, ada dampak positif dari organisasi Muslimat NU dan dukungan pondok pesantren terhadap kemenangannya menjadi kepala daerah Perempuan pesantren berikutnya yang terpilih sebagai Bupati Jombang adalah Nyai Hj. Munjidah Wahab. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Jombang mendampingi Bupati Nyono, tetapi di tengah perjalanan periode pemerintahan, mereka pecah kongsi. Pada pemilu 2018 mereka sama-sama maju menjadi calon Bupati Jombang periode 2018-2022. Bu Munjidah diusung oleh empat partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sebagai tokoh perempuan pesantren dia punya nama besar dari ayahnya yakni KH. Wahab Hasbullah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan salah satu pahlawan Nasional. Munjidah juga memegang berbagai organisasi perempuan mulai dari Ikatan pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Fatayat Nahdlatul Ulama, dan sekarang aktif menjadi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang. Saat ini Munjidah juga menjadi salah satu pemimpin dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Modal patron klien inilah yang dimanfaatkan oleh Munjidah maju dan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah langsung.

Khoironi adalah Wakil Bupati Situbondo yang terpilih mendampingi Karna Suwandi, sebagai Bupati Situbondo periode 2020-2024. Khoironi merupakan Wakil Bupati perempuan pertama di Situbondo. Nyai khoironi juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Besuki Situbondo sekaligus sebagai Wakil Ketua Muslimat NU Situbondo. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota legislatif dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan periode 2004 – 2009. Selain koalisi partai di atas, dukungan terbesar terhadap kemenangan Khoironi juga ditentukan oleh Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo

Puput Tantriana Sari Hasan Aminuddin adalah Bupati Probolinggo sejak 2013-2018 untuk periode pertama dan periode kedua 2018-2022. Dia menggantikan suaminya Hasan Aminuddin, Bupati Probolinggo sebelumnya, yang juga menjabat Bupati selama dua periode. Puput menjadi perempuan termuda sekaligus perempuan pertama terpilih menjadi Bupati, saat usianya masih 29 tahun, melanjutkan estafet kepemimpinan dari suaminya.

Kecenderungan mengamankan kekuasaan dengan alasan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan Kepala Daerah sebelumnya, semakin meneguhkan bahwa politik dinasti sangat kuat di daerah Tapal kuda seperti Probolinggo. Dukungan sosial yang semakin luas juga diberikan oleh KH. Hafid Aminuddin Pengasuh Ponpes syekh Abdul Qodir al-Jailani Probolinggo yang tak lain adalah kakak iparnya sendiri. Hal ini semakin meneguhkan besarnya hegemoni pesantren untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan suara pemilih. Bahkan Puput mampu mengalahkan calon petahana Salim Qurasy yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Probolinggo

Sama halnya dengan Situbondo, Pilkada di Kabupaten Sumenep Madura, juga menghadirkan nuansa baru Wakil Bupati perempuan pertama yakni Nyai Dewi Kholifah. Pencalonan ibu Nyai pesantren di kancah Pilkada politik lokal menjadi menarik tatkala berhadapan dengan anggapan sebagian warga Madura yang menolak kiprah perempuan di ranah publik. Dengan terpilihnya Nyai Eva menggugurkan budaya patriarki, bahkan semakin menguatkan representasi dan kiprah perempuan pesantren di kancah politik.

Sebelum aktif di politik, Kholifah menjadi pengasuh Pondok Pesantren Terate, Pandian Sumenep sekaligus menjadi Ketua Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sumenep selama dua periode. Dari sisi semangat dan kegigihannya, Nyai Eva bisa disamakan dengan Kholifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, karena mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah berulang kali dan pada pemilihan ketiga, beliau kemudian mendapatkan kemenangan dan dilantik menjadi Wakil Bupati Kabupaten Sumenep pada tanggal 27 Februari 2021 di Gedung Grahadi Surabaya.

### **Heterosugesti Pesantren Meningkatkan Partisipasi Publik**

Elite Agama dalam pilkada mempunyai pengaruh besar dan menjadi primadona dalam ranah sosial, utamanya dalam ranah sosial politik di masyarakat. Istilah elite menurut Sekerka dan Yacobian adalah seseorang yang mempunyai dan memperoleh dari apa yang didapatkan orang lain<sup>28</sup>. Karena pengaruh itulah, maka banyak calon kepala daerah yang bertarung di ajang pemilihan kepala daerah langsung meminta dukungan kepada elit agama atau pengasuh pondok pesantren<sup>29</sup>. Beberapa manfaat yang diperoleh oleh calon pasangan pilkada antara lain mendapatkan dukungan suara dari pemilih dan dapat membangun jejaring sosial dari tingkat atas sampai ke akar rumput (*grass root*)<sup>30</sup>. Dalam satu lingkungan masyarakat pasti akan dijumpai kelompok tertentu yang mempunyai kekuatan pengaruh dan mampu merubah perilaku dan pemikiran masyarakat. Meraka dengan rela dan ikhlas selalu tunduk terhadap apa yang

28 Leslie Elizabeth Sekerka dan Marianne Marar Yacobian, "Fostering Workplace Respect in an Era of Anti-Muslimism and Islamophobia: A Proactive Approach for Management," *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal* 37, no. 8 (20 November 2018): 813–31, <https://doi.org/10.1108/EDI-11-2017-0265>.

29 Zaini Tamin Abd Rohim, "Pesantren Dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3, no. 2 (10 November 2015): 323, <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.2.323-345>.

30 Syamsul Rijal, "Peran Politik Kiai dalam Pendidikan Pesantren," *Tadrîs* 9, no. 2 (2014).

diinstruksikan oleh elit agama<sup>31</sup>.

Persentuhan elit dan kekuasaan serta dinamika relasi antara ulama dan kekuasaan menjadi kajian cukup menarik sebab faktanya kemudian lahir kebijakan politik sebagai aspek penentu jalinan tersebut. Sehingga bukan cuma aspek sosial budaya saja yang mempengaruhi keterpilihan atau penentu utama calon penguasa, tetapi juga kebijakan politik<sup>32</sup>. Hasil riset dari Muslim, menjelaskan bahwa ada proses marginalisasi kedudukan elit karena kuatnya dominasi kekuasaan politik elit di kelompok lain, sebaliknya Bandiyah<sup>33</sup> dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat dua aspek yang menunjang keberadaan *champion* dalam politik lokal, yakni aspek kekuasaan aspek kesempatan. Walaupun jawara merupakan semacam raja kecil dalam politik lokal seperti di Banten misalnya, namun hubungan dengan ulamamasih menunjukkan kepatuhan kepada tokoh agama yang berarti pelindung, sehingga ikatan klien antara keduanya masih terjalin<sup>34</sup>.

Terjalin patron klien sangat kuat antara kyai dan santri, terlebih lagi kharisma kyai di pondok pesantren menjadi magnet utama di mata santri dan semua lapisan masyarakat. Sosok kyai dianggap sosok panutan dan menjadi tempat berkeluh kesah, tempat bertanya segala hal yang berkaitan dengan hal agama dan hubungan sosial kemasyarakatan<sup>35</sup>. Pengaruh kharismatik kyai sangat besar di mata masyarakat. Kyai akan dipandang orang sempurna bila dilihat dari garis keturunan dan paradigma berpikir dalam memberikan nasehat. Biasanya kyai berasal

dari latar belakang keluarga dari kalangan atas. Selain itu kyai juga dianggap memiliki keilmuan agama yang cukup luas, hal ini dapat dibuktikan bilamana kyai tampil memberikan ceramah dan tausiyah agama di masyarakat<sup>36</sup>.

## Kesimpulan

Kajian studi tentang hegemoni elit agama terhadap kepemimpinan perempuan pesantren sebagai kepala daerah menunjukkan bahwa terdapat hegemoni kyai pondok pesantren ataupun tokoh – tokoh agama di sebagian pondok pesantren di wilayah Jawa Timur. Terdapat fenomena baru, yakni keterlibatan kyai pesantren sebagai pendukung dan tim sukses pada Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung (Pemilukada) Gubernur, Bupati dan wali kota. Selain itu terdapat transformasi fleksibilitas pemaknaan kepemimpinan perempuan pesantren dalam ranah politik lokal, sehingga kyai memberikan dukungan dalam bentuk materi ceramah tentang memilih kriteria pemimpin dalam aturan agama Islam. Meski tidak terdapat sosialisasi khusus dalam acara keagamaan di pondok pesantren, namun para santri diberikan pendidikan politik sehingga mereka paham akan haknya dan mampu memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Kepemimpinan perempuan pesantren menjadi Kepala Daerah tentu saja memanfaatkan hegemoni agama dari seorang elit atau tokoh agama di Pondok Pesantren. Adanya keinginan meraih kekuasaan dilakukan oleh perempuan karena beberapa alasan seperti tingginya strata pendidikan, kemampuan adaptasi kultur dan aktivitas diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik. Tokoh elit agama mempunyai peran penting dalam mengantarkan kepemimpinan perempuan dari pesantren guna meraup suara pemilih dan terpilih menjadi Kepala Daerah pada suksesi Pilkada. Dibutuhkan strategi khusus bagi perempuan pesantren yang mempunyai keinginan menjadi kepala daerah dengan meruntuhkan budaya patriarki. Hegemony elit agama, dukungan

31 Stratos Patrikios dan Georgios Xezonakis, "Religious Market Structure and Democratic Performance."

32 Paul Joosse dan Robin Willey, "Gender and Charismatic Power."

33 Asep Muslim dkk., "Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten," *Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 31, no. 2 (23 Desember 2015): 461, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1555>.

34 Jon Swords, "Crowd-Patronage—Intermediaries, Geographies and Relationships in Patronage Networks," *Poetics* 64 (Oktober 2017): 63–73, <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2017.09.001>.

35 Yanwar Pribadi, "Strongmen and Religious Leaders in Java: Their Dynamic Relationship in Search of Power," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 49, no. 1 (29 Juni 2011): 159–90, <https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.159-190>.

36 Eko Setiawan, "Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren: Studi Hubungan Antara Kyai dan Santri," *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam*, 16 September 2013, <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2372>; Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri: Dari Kyai Menjadi Bupati*, Cetakan I (Mangli, Jember: STAIN Jember Press, 2013).Jember", "ISBN": "978-602-229-262-3



pondok pesantren, partai politik pengusung dan organisasi perempuan Muslimat NU menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan kemenangan kandidat calon kepala daerah perempuan. Organisasi perempuan memainkan peran penting dalam memobilisasi pemilih perempuan .

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini , sebagai bagi elit agama yaitu kyai pesantren, seharusnya kembali ke khittah mensyiarkan agama secara utuh, menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Jangan ada multi kepentingan utamanya kepentingan politik dan kekuasaan yang dapat menimbulkan konflik dan kebencian antar sesama.

## Daftar Pustaka

- Ahu Sumbas. “Gendered Local Politics: The Barriers to Women’s Representation in Turkey.” *Democratization* 27, no. 4 (18 Mei 2020): 570–87. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1706166>.
- Asep Muslim, Lala M Kolopaking, Arya H Dharmawan, dan Endriatmo Soetarto. “Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten.” *Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 31, no. 2 (23 Desember 2015): 461. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1555>.
- Asnath N. Natar. “Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no.2 (30 Juli 2019): 133. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.133-147>.
- Benjamin K. Sovacool. “Bamboo Beating Bandits: Conflict, Inequality, and Vulnerability in the Political Ecology of Climate Change Adaptation in Bangladesh.” *World Development* 102 (Februari 2018): 183–94. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.014>.
- Celtis Lativolia Sangari, Agustinus Pati, dan Alfon Kimbal. “Peran Politik Perempuan dalam Menentukan Kepemimpinan Politik Lokal (Studi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat).” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (14 Juli 2017).
- Eko Setiawan. “Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren: Studi Hubungan Antara Kyai dan Santri.” *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam*, 16 September 2013. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2372>.
- Endang Turmudi. *Struggling for the Umma : Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. ANU Press, 2006. [https://doi.org/10.26530/OAPEN\\_459752](https://doi.org/10.26530/OAPEN_459752).
- Eric R. Hansend and Christopher J. Clark. “Diversity in Party Leadership in State Legislatures.” *State Politics & Policy Quarterly* 20, no. 1 (Maret 2020): 81–107. <https://doi.org/10.1177/1532440019885378>.
- Guno Tri Tjahjoko. *Politik Ambivalensi: Nalar Elite Di Balik Pemenangan Pilkada*. Cetakan I. Yogyakarta: PolGov, 2016.
- Idil Akbar. “Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan.” *CosmoGov* 2, no. 1 (14 April 2017): 95. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>.
- Jon Swords. “Crowd-Patronage—Intermediaries, Geographies and Relationships in Patronage Networks.” *Poetics* 64 (Oktober 2017): 63–73. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2017.09.001>.
- Joseph C Ebegbulem. “The Imperative of Democratic Consolidation in Nigeria Through.” *African Journal of Politics and Administrative Studies (AJPAS)* 10, no. 1996 (2017): 97–105.
- Julie Lassébie. “Gender Quotas and The Selection of Local Politicians: Evidence from French Municipal Elections.” *European Journal of Political Economy* 62 (Maret 2020): 101842. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.101842>.
- Khoirurrijal. “Islam Nusantara Sebagai Counter Hegemoni Melawan Radikalisme Agama di Indonesia.” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (22 Juni 2017): 77. <https://doi.org/10.32332/akademika.v22i1.616>.
- Kholid Zulfa. “Belenggu Kepemimpinan Perempuan Dalam Ranah Politik.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 3, no. 1 (29

- Maret 2004): 67. <https://doi.org/10.14421/musawa.2004.31.67-78>.
- Ki-Young Shin. “An Alternative Form of Women’s Political Representation: Netto, a Proactive Women’s Party in Japan.” *Politics & Gender* 16, no. 1 (Maret 2020): 78–98. <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000606>.
- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara : Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (10 Desember 2018): 257. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>.
- Laila Prager. “Emirati Women Leaders in the Cultural Sector: From ‘State Feminism’ to Empowerment?” *Hawwa* 18, no. 1 (8 Mei 2020): 51–74. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341370>.
- Leslie Elizabeth Sekerka dan Marianne Marar Yacobian. “Fostering Workplace Respect in an Era of Anti-Muslimism and Islamophobia: A Proactive Approach for Management.” *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal* 37, no. 8 (20 November 2018): 813–31. <https://doi.org/10.1108/EDI-11-2017-0265>.
- Linda Dwi Eriyanti. “Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 20, no. 1 (16 Januari 2017): 69. <https://doi.org/10.22146/jsp.18002>.
- M. Nazmul Islam, Fumitaka Furuoka, dan Aida Idris. “Mapping The Relationship Between Transformational Leadership, Trust in Leadership and Employee Championing Behavior During Organizational Change.” *Asia Pacific Management Review* 26, no. 2 (Juni 2021): 95–102. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.09.002>.
- Mahmut Polatcan dan Osman Titrek. “The Relationship Between Leadership Behaviors of School Principals and Their Organizational Cynicism Attitudes.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 141 (Agustus 2014): 1291–1303. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.222>.
- Matthew B. Miles, A.M. Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014.
- Mouliza Kristhoper Donna Sweinstani. “Perempuan dan Politik Industri Kreatif dalam Kerangka Pembangunan: Lesson Learned dari Indonesia dan Thailand.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (22 Januari 2021). <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.1-15>.
- Ni Wayan Arini. “Kepemimpinan Lokal dan Kehidupan Sosial Politik Perempuan di Dua Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (5 Januari 2015). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i2.4466>.
- Nurul Azizah. *Artikulasi Politik Santri: Dari Kyai Menjadi Bupati*. Cetakan I. Mangli, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Nurul Azizah, Joseph Okwesili Nkwede, dan Mohammad Armoyu. “The Octopus-Like Power of Pesantren Dynasty in the Dynamics of Local Politics.” Disunting oleh Richard Meissner. *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (1 Januari 2021): 1962056. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1962056>.
- Paul Joosse dan Robin Willey. “Gender and Charismatic Power.” *Theory and Society* 49, no. 4 (Juni 2020): 533–61. <https://doi.org/10.1007/s11186-020-09392-3>.
- Putri Limilia. “Perempuan dan Kesenjangan Digital Di Dalam Keluarga.” *Humanisma : Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.30983/jh.v2i1.510>.
- Shaoping Qiu, Amin Alizadeh, Larry M. Dooley, dan Ruijuan Zhang. “The Effects of Authentic Leadership on Trust in Leaders, Organizational Citizenship Behavior, and Service Quality in the Chinese Hospitality Industry.” *Journal of Hospitality and Tourism Management* 40 (September 2019): 77–87. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2019.07.002>.

jhtm.2019.06.004.

Stratos Patrikios dan Georgios Xezonakis. "Religious Market Structure and Democratic Performance: Clientelism." *Electoral Studies* 61 (Oktober 2019): 102073. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102073>.

Suneeta Dhar. "Gender and Sustainable Development Goals (SDGs)." *Indian Journal of Gender Studies* 25, no. 1 (Februari 2018): 47–78. <https://doi.org/10.1177/0971521517738451>.

Syamsul Rijal. "Peran Politik Kiai dalam Pendidikan Pesantren." *Tadrīs* 9, no. 2 (2014).

Vita Agustina. "Hegemoni Kiai Terhadap Praktek Poligami." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 2 (3 Desember 2014): 127. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.127-140>.

Yanwar Pribadi. "Strongmen and Religious Leaders in Java: Their Dynamic Relationship in Search of Power." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 49, no. 1 (29 Juni 2011): 159–90. <https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.159-190>.

Yusuf, Muhammad. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Kearifan Lokal: Pemikiran Ulama Bugis Dan Budaya Bugis." *Analisa: Journal of Social and Religion* 22, no. 1 (2015): 69.

Zaini Tamin Abd Rohim. "Pesantren Dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3, no. 2 (10 November 2015): 323. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.2.323-345>.

Zezen Zaenudin Ali. "Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (10 Desember 2017): 63. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>.